

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Bagi manajemen, laporan keuangan merupakan media untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan pertanggungjawaban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Pemegang saham sebagai pihak yang menanamkan modal dalam perusahaan memerlukan informasi mengenai sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Kreditur dan investor sebagai pihak yang memberikan pinjaman maupun akan melakukan investasi, memerlukan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah memerlukan informasi dalam rangka menentukan besarnya pajak yang perlu dibayarkan pada negara dan karyawan perusahaan memerlukan informasi dalam rangka menentukan jaminan kesejahteraan bagi para karyawan. Seiring dengan penggunaan dari laporan keuangan tersebut maka laporan keuangan harus disajikan dengan benar sesuai dengan standar

Fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Seorang manajer yang dihadapkan pada kondisi keragu-raguan harus menerapkan prinsip akuntansi yang bersifat konservatis.

Konservatisme dalam akuntansi mensyaratkan adanya verifikasi yang asimetris antara pengakuan laba dan rugi. Semakin tinggi tingkat perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba versus pengakuan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansinya (Watts, 2003a dalam Ratna, 2008). Penggunaan prinsip konservatisme akan menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Konservatisme akan menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.

Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Ratna, 2008). Komitmen pihak manajemen dan pihak internal perusahaan tersebut merupakan suatu bagian dari implementasi *good corporate governance*, dengan aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaan. Karakteristik dari manajemen puncak perusahaan akan mempengaruhi tingkatan

konservatisme yang akan digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

Salah satu fungsi utama dari dewan komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsi mereka untuk memonitor manajemen. Sehingga *board directors* yang kuat (dewan yang memiliki komisaris independen dalam proporsi lebih tinggi) akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif.

Penelitian yang dilakukan Ahmed dan Duellman (2007) dalam Ratna (2008) menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara persentase *inside directors* dalam dewan dengan konservatisme. Apabila *insider directors* dan manajemen menjalankan fungsi monitoring dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula.

Hasil penelitian Ratna (2008) menunjukkan adanya pengaruh positif keberadaan komite audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik dengan adanya komite audit. Komite audit akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Keberadaan komite audit akan

meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan dengan penggunaan prinsip konservatisme.

Diantara berbagai faktor yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang efektif, dewan komisaris (struktur pengelolaan) merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku manajer dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam penerapan kebijakan konservatisme akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Mizruchi (1983) dalam Hapsoro (2006) bahwa dewan komisaris merupakan *"the ultimate center of control."* Semakin besar jumlah komisaris, fungsi *service* dan kontrol akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan (Fama dan Jensen, 1983 dalam Kusumawati dan Riyanto, 2005). Fungsi monitoring yang dijalankan dewan komisaris menuntut penggunaan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Namun penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Arif dan Bambang (2007) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Kondisi ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang kurang agresif (kurang konservatif).

Di kalangan para peneliti, prinsip konservatisme akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003). Hal ini memotivasi peneliti untuk mengkaji tentang praktek konservatisme akuntansi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTEK KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ratna (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel ukuran dewan komisaris. Berdasarkan pendapat Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam Arif dan Bambang (2007), ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang kurang agresif (kurang konservatif).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif?
3. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Komisaris independen yang berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.
2. Kepemilikan manajerial yang berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.
3. Keberadaan komite audit yang berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.
4. Ukuran dewan komisaris yang berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan menerapkan akuntansi secara konservatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh implementasi *corporate governance* yang terkait dengan karakteristik *board of directors* terhadap praktek konservatisme di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruh implementasi *corporate governance* dan implikasinya bagi investor